

*RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2019*



---

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp. 0511-670166 Fax. 0511-6701255

Marabahan - Kabupaten Barito Kuala

Website : [www.diskominfo.baritokualakab.go.id](http://www.diskominfo.baritokualakab.go.id) e-Mail : [diskominfo@baritokualakab.go.id](mailto:diskominfo@baritokualakab.go.id)

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA TAHUN LALU ...</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Rentra Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Infromatika.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Skpd.....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> .....	<b>25</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	27
3.3 Program Dan Kegiatan .....	29
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>40</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>43</b>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya **Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan gambaran tentang program-program dan kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selama 1 (satu) tahun mendatang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 dan RPJMD TAHUN 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Akhirnya, semoga memberikan manfaat.

Marabahan, Juli 2018

Kepala Dinas

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP  
NIP. 19650501 198602 1 007

# **BAB I PENDAHULUAN**

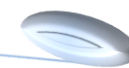
## **1.1. Latar Belakang**

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke Dua dari Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra –PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022, dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025. Renja PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2017-2022 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- 
1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  2. Rencana Kerja (Renja) PD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1213);
  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308)
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
  19. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/246/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah untuk :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019.
- Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Diskominfo sesuai aturan yang berlaku.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA**

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.3 Program dan Kegiatan





**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA**

#### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika**

Pengukuran pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan mengacu kepada penetapan Renstra Tahun 2017-2022 yang pada saat ini mengacu kepada RKPD 2005-2025 Kabupaten Barito Kuala. Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (input), proses (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan Organisasi pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, buah, hari, persen dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 yang mengacu kepada RPJP 2005 - 2025, Visi Misi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan tahun transisi antara RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022 serta Renstra Dishubkominfo 2012-2017 dan Renstra Diskominfo 2017-2022 pasca di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dituangkan dalam Evaluasi Renja sampai dengan tahun 2018. Hasil pengukuran evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan  
Pencapaian Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN 2016*	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN				
					TARGET RENJA PD TAHUN 2017	REALISASI RENJA PD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENTRA (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)= (10/4)			
0	<b>Non Urusan</b>												
0	0	-											
0	0	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0%								
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat	12 bulan		12 bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	200
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komuniaksi sumber daya air dan listrik	Biaya listrik, air dan telpon	12 Bulan		12 bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	200
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan		12 bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	200
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan		12 bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	200
0	0	1	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12 bulan		12 bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	200
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Penyediaan bahan buku bacaan penyediaan bahan bacaan koran 2 SKH					-	-		

0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minum	Makanan dan minuman harian,tamu, rapat dan kegiatan	12 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	200
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	200
0	0	1	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan		-	-	-	12 Bulan	12	100
0	0	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.					-			
0	0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	2		-	-	-	2	2	100
0	0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	1 Jenis		-	-	-	-		
0	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	4 unit		38 buah	38 buah	100	4 unit	4	100
0	0	2	10	Pengadaan mebeleur	Meja dan kursi kantor Kursi rapat	8 Buah		-	-	-	-	-	-
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Petugas pemelihara gedung kantor Rehab berat/sedang gedung kantor	12 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 bulan	24	200
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan bermotor	6 Unit		4 unit	4 unit	100	4 Unit	8 unit	133
0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	3 unit		5 Unit	5 Unit	100	7 Unit	12	100
0	0	5		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat.	0%				-			
0	0	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek	5 orang		5 orang	4 orang	80	8 orang		



4	#	19	<b>Program Pengelolaan Informasi Publik</b>	Peningkatan ketersediaan dan akses informasi publik	0 Persentase (%)							
4	#	19	Pembinaan dan Pengembangan Media Center Kabupaten	Jumlah operasional Media Center "MC Selidah"	12 bulan							
4	#	19	Penyebarluasan informasi melalui media baru	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui website pemerintah kabupaten	305 Informasi							
4	#	19	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Informasi	Jumlah peserta bintek Pengelolaan PPID Pembantu Jumlah SDM peserta bintek/workshop Jurnalistik/pengelola informasi	63 peserta 40 peserta							
4	#	19	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan	Jumlah jenis media informasi yang digunakan	6 Jenis							
4	#	19	Pembinaan dan pengembangan penyebarluasan informasi melalui Media Pertunjukan Rakyat (Pentura)	Jumlah partisipasi pada event Pekan Informasi Nasional (PIN )	1 event							
4	#	20	<b>Program Pengelolaan Komunikasi Publik</b>	peningkatan Layanan Komunikasi Publik	0 Persentasi (%)							
4	#	20	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah peserta sosialisasi internet sehat	450 peserta							
4	#	20	Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	5 Kelompok							
4	#	20	Pelayanan Pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	100 Persen							

4	#	21	<b>Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universail Service Obligation (KPU/USO)</b>	Menurunnya jumlah desa blankspot	0 Jumlah							
4	#	21	Fasilitas penyediaan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO	Jumlah desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	0							
4	#	21	Pembinaan dan pengembangan Fasilitas Akses informasi publik	Jumlah fasilitas akses internet di area publik	3 titik							
4	#	21	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah Menara Telekomunikasi/BTS yang sesuai cellplan	50 OH							
4	#	21	Pembinaan dan pengembangan internet Desa (Desa Broadband)	Jumlah desa yang terkoneksi dengan jaringan internet	50 OH							
4	#	22	<b>Program Pengembangan Infrastruktur TIK</b>	peningkatan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informatika	0 Persen							
4	#	22	Pemeliharaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Frekuensi pemeliharaan titik interkoneksi jaringan e-Gov Kabupaten	53 titik							
4	#	22	Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten	Tersedianya ruang server & peralatan server pemerintah kabupaten	1 Unit							
4	#	22	Penyediaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Jumlah titik interkoneksi jaringan e-Gov yang berfungsi dengan baik	53 titik							
4	#	22	Penyediaan Bandwidth Internet	Jumlah kapasitas bandwidth	400 Mbps							
4	#	23	<b>Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi</b>	ketersediaan aplikasi, sistem informasi dan data elektronik terintegrasi	0%							

4	#	23	Penyediaan Layanan Portal Data "Batola One Data"	Jumlah data base pada portal data Kabupaten yang tersedia dan akurat	100 database							
4	#	23	Penyediaan aplikasi pelayanan publik	Jumlah Aplikasi pelayanan publik yang tersedia	3 Aplikasi							
4	#	23	Penyediaan Aplikasi pemerintahan	Jumlah Aplikasi pemerintahan yang tersedia	3 Aplikasi							
4	#	23	Penyediaan Aplikasi Smart City Command Center	Jumlah Aplikasi Smart City Command Center	3 Aplikasi							
4	#	24	<b>Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government</b>	Jumlah SKPD yang melaksanakan e-Government	0%							
4	#	24	Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government	Jumlah dokumen usulan perumusan regulasi dan kebijakan tata kelola e-Government yang disetujui dan ditetapkan	4 Dokumen							
4	#	24	Pengembangan SDM TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM TIK	150 orang							
4	#	24	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah GCIO yang bersertifikat	5 orang							
4	#	24	Penyusunan Detail Enggining Desain Smart City	Jumlah Detail Enggining Desain yang tersedia	3 Dokumen							
4	#	24	Pembinaan dan pengembangan Website Desa	Jumlah website desa yang menggunakan domain desa.id	74 website							



4	#	24	Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Jumlah dokumen evaluasi SPBE yang tersedia dan valid Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	6 Dokumen 3 kali							
4	#	24	Kerjasama pengembangan smart city/ smart regency	Jumlah Dokumen kerjasama	1 Dokumen							
4	#	24	Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan pemerintah pusat (baritokualakab.go.id)	Jumlah Subdomain yang digunakan	78 Subdomain							
4												
4	#		<b>Statistik</b>									
4	#	15	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	Data sektoral kabupaten yang akurat	0%							
4	#	15	Pengumpulan dan pengolahan data sektoral kabupaten	Buku data sektoral kabupaten	1 buku							
4	#		<b>Persandian</b>									
4	#	1	<b>Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0 Persentase (%)							
4	#	1	Pengelolaan informasi pemerintah daerah yang berklasifikasi diamankan	Jumlah pendistribusian informasi daerah berklasifikasi diamankan	255 Informasi							
4	#	1	Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah peserta bintek yang paham pengelolaan keamanan informasi dan persandian	40 peserta							
4	#	1	Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	Persentase ketersediaan peralatan Jaring Komunikasi Sandi (JKS)	9 unit							

4	#	1	Fasilitasi pengelolaan keamanan sistem informasi SKPD	ersentasi fasilitasi penyelesaian kasus keamanan informasi	100 Persen							
4	#	1	Penyertaan diklat peningkatan kapasitas sandiman Kabupaten	Jumlah Sandiman yang bersertifikat	2 orang							

Keterangan :

\* untuk tahun 2016 realisasi target kinerja masih tergabung di dalam laporan kinerja Dishubkominfo.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022.

Kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra 2017-2022, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017

No	Indikator	SPM/S tandar nasion al	IKK	Target Rentra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika			6				6				
2	Persentase peningkatan penerapan e-government			15				15				
3	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala				65	68	70	-	65	68	70	
4	Persentase Jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan				100	100	100	-	100	100	100	

5	Indek (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	SPBE				1,3	1,5	2	-	1,34	1,5	2	
---	---	------	--	--	--	-----	-----	---	---	------	-----	---	--

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dnas Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank spot serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Barito Kuala;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas dan kuantitas
3. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, dan belum adanya aplikasi perencanaan berdasarkan penilaian berkala.
4. Belum adanya kegiatan di bidang persandian karena bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya PD baru.
5. Belum adanya kegiatan di bidang statistik karena bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya PD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2019

Renja Dinas Komuniaksi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala disusun dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pergnagkat Daerah (RKPD) yang telah disusun kemudian disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan disajikan di dalam berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2019**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	nsurat menyurat	400 lembar	22,920,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	KabupatenTena ga Administrasi Kantor Materai	2 Orang 400 lembar	22,920,000	
	Penyediaan Jasa Komuniaksi sumber daya air dan listrik	SKPD	Biaya listrik, air dan telpon	12 bulan	38,000,000	Penyediaan Jasa Komuniaksi sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah Rekening Langganan Yang di Bayarkan	36 Bulan	25,080,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Pemeliharaan n kendaraan bermotor	4 unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	PajakSTNK	6 Unit	4,000,000	
	Penyediaan ATK	SKPD	Penyediaan ATK	30 Jenis	16.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah ATK yang disediakan	31 jenis	14,637,500	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	Barang cetakak dan penggandaan	10 jenis	15.000.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	Jumlah Barang Cetakan	9 Jenis	7,200,750	
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD	Penyediaan bahan korn 2 SKH dan penyediaan bahan buku bacaan	12 bulan /10 buku	5.000.000	Penyediaan makanan dan minum	SKPD	Makanan dan Minuman yang disediakan	5.360 Porsi	24,750,000	
	Penyediaan makan dan minum	SKPD	Makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	4.761	25.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten	Laporan Perjalanan Dinas	15 Judul	48,500,000	
	Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar daerah Idalam dan luar propinsi	Rapat koordinasi/konsultasi keluar daeah	85 OH	250.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SKPD	Laporan Perjalanan Dinas	30 Judul	7,500,000	

	Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan	Koordinasi & konsultasi ke kecamatan	40 OH	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	KabupatenTernaga Administrasi Kantor Materai	2 Orang 400 lembar	22,920,000	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.</b>	0%		
	Pengadaan kendaraan dinas / operasioanl	SKPD	Jumlah kendaran dinas	8 unit	390.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan	2 Unit	50,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	6 jenis	40.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung	1 Jenis	5,000,000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor	11 jenis	300.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Disediakan	4 Jenis	65,458,468	
	Pengadaan mebeleur	SKPD	Jumlah mebeleur	40 buah	150.000.000	Pengadaan mebeleur	SKPD	Jumlah Meubleur	8 buah	12,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	24 OB/I unit	230.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung kantor Yang di Rehab	1 Unit	222,869,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantoryang dipelihara	6 jenis	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Yang dipelihara	6 Unit	16,799,690	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	4 buah	17.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	3 Jenis	5,000,000	
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat.</b>			
	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek	10 OH	96.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek	10 Orang	76,600,000	
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan keuangan</b>			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah laporan	1	2.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah laporan	1	2.000.000	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	SKPD	Jumlah Laporan	2	1.500.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	SKPD	Jumlah Laporan	2	1.500.000	
	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	SKPD	Jumlah laporan	-	-	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	SKPD	Jumlah laporan	2	-	

	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah Laporan	1	1.500,000	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah Laporan	1		
5	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>					<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>		<b>Data sektoral kabupaten yang akurat</b>			
	Pengumpulan dan pengolahan data sektoral kabupaten	Kabupaten	Buku data sektoral kabupaten	1 buku	150,000,000	Pengumpulan dan pengolahan data sektoral kabupaten	Kabupaten	Data sektoral kabupaten	1 judul	42,190,000	
6	<b>Program Pengelolaan Informasi Publik</b>					<b>Program Pengelolaan Informasi Publik</b>		<b>Peningkatan ketersediaan dan akses informasi publik</b>			
	Pembinaan dan Pengembangan Media Center Kabupaten	Kabupaten, SKPD	Jumlah operasional Media Center "MC Selidah"	12 bulan	400,000,000						
	Penyebarluasan informasi melalui media baru	Kabupaten	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui website pemerintah kabupaten	305 Informasi	210,000,000	Penyebarluasan informasi melalui media baru	Kabupaten	Jumlah Informasi yang diproduksi dan dipublikasikan	264 Informasi	203,800,000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Informasi	Kabupaten, SKPD,	Jumlah peserta bintek Pengelolaan PPIID	63 peserta 40 peserta	50,000,000						
	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan	Kabupaten, SKPD	Jumlah jenis media informasi yang digunakan	6 Jenis	100,000,000	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan	Kabupaten, SKPD	Jumlah jenis media informasi yang digunakan	6 Jenis	34,940,000	
	Pembinaan dan pengembangan penyebaran informasi melalui Media Pertunjukan Rakyat (Pentura)		Jumlah partisipasi pada event Pekan Informasi Nasional (PIN)	1 event	100,000,000						
7	<b>Program Pengelolaan Komunikasi Publik</b>					<b>Program Pengelolaan Komunikasi Publik</b>		<b>peningkatan Layanan Komunikasi Publik</b>			
	Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kabupaten	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	5 Kelompok	70,000,000	Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kabupaten	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	5 Kelompok	54,700,000	
	Pelayanan Pengaduan masyarakat	Kabupaten	Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	100 Persen	15,000,000						

	Sosialisasi Internet Sehat	Kabupaten	Jumlah peserta sosialisasi internet sehat	450 peserta	85,000,000	Sosialisasi Internet Sehat	Kabupaten	Jumlah peserta sosialisasi internet sehat	450 peserta	25,430,000	
8	<b>Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universail Service Obligation (KPU/USO)</b>					<b>Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universail Service Obligation (KPU/USO)</b>		Menurunnya jumlah desa blankspot	0 Jumlah		
	Fasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO	Kecamatan	Persentase Desa Blankspot	195 OH	60,000,000	Fasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO	Kabupaten	Jumlah menara telekomunikasi KPU/USO yang diusulkan	4 buah	36,600,000	
	Pembinaan dan pengembangan internet Desa (Desa Broadband)	Kabupaten	Jumlah desa broadband	50 OH	15,000,000	Pembinaan dan pengembangan internet Desa (Desa Broadband)	Kabupaten	Jumlah desa yang terkoneksi dengan jaringan internet	50 Desa	29,650,000	
	Pembinaan dan pengembangan Fasilitas Akses informasi publik	Kabupaten,	Jumlah fasilitas akses internet di area publik	3 titik	300,000,000						
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Kecamatan	Jumlah Menara Telekomunikasi/BTS yang sesuai cellplan	50 OH	15,000,000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Kabupaten	Jumlah Menara Telekomunikasi/BTS yang sesuai cellplan	102 buah	12,600,000	
9	<b>Program Pengembangan Infrastruktur TIK</b>					<b>Program Pengembangan Infrastruktur TIK</b>		peningkatan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informatika	0 Persen		
	Penyediaan Bandwidth Internet	Kabupaten	Jumlah kapasitas bandwidth	400 Mbps	629,207,040	Penyediaan Bandwidth Internet	Kabupaten	Jumlah kapasitas bandwidth	400 Mbps	629,207,040	
	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Surveiller ruangan command center	Kabupaten, SKPD	Prosentasi layanan monitoring yang terlayani	100 Persen	3,000,000,000						
	Pemeliharaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Kabupaten, SKPD	Frekuensi pemeliharaan titik interkoneksi jaringan e-Gov Kabupaten	53 titik	1,000,000,000	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan E-Government Kabupaten	Kabupaten	Jumlah titik interkoneksi Jaringan e-Gov yang terpelihara	17 titik	391,150,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten	SKPD	Tersedianya ruang server & peralatan server pemerintah kabupaten	1 Unit	1,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten	SKPD	Peralatan Server Yang Tersedia	1 Unit	354,142,960	



	Penyediaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Kabupaten, SKPD	Jumlah titik interkoneksi jaringan e-Gov yang berfungsi dengan baik	53 titik	3,000,000,000	Penyediaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Kabupaten, SKPD	Jumlah titik interkoneksi jaringan e-Gov yang berfungsi dengan baik	28 titik	482,800,000	
10	<b>Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi</b>					<b>Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi</b>		<b>ketersediaan aplikasi, sistem informasi dan data elektronik terintegrasi</b>			
	Penyediaan Layanan Portal Data "Batola One Data	SKPD	Terselenggaraanya Layanan Portal Data "Batola One Data	100 database	75,000,000						
	Penyediaan aplikasi pelayanan publik	Kabupaten	Jumlah Aplikasi pelayanan publik yang tersedia	2 Aplikasi	500,000,000						
	Fasilitasi penanganan kasus keamanan sistem informasi	Kabupaten	Persentase fasilitasi penyelesaian kasus keamanan informasi	100 Persen	80,000,000						
	Penyediaan Aplikasi pemerintahan	Kabupaten	Jumlah Aplikasi pemerintahan yang tersedia	2 Aplikasi	500,000,000	Penyediaan Aplikasi pemerintahan	Kabupaten	Jumlah Aplikasi pemerintahan yang tersedia	4 Aplikasi	450,607,040	
	Penyediaan Aplikasi Smart City Command Center	Kabupaten	Jumlah Aplikasi Smart City Command Center	2 Aplikasi	300,000,000						
11	<b>Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government</b>					<b>Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government</b>		Jumlah SKPD yang melaksanakan e-Government			
	Kerjasama pengembangan smart city/ smart regency	Kabupaten	Jumlah Dokumen kerjasama	1 Dokumen	100,000,000						
	Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan pemerintah pusat (baritokualakab.go.id)	Kabupaten	Jumlah Subdomain yang digunakan	78 Subdomain	38,000,000						
	Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government	Kabupaten	Jumlah dokumen usulan perumusan regulasi dan kebijakan tata kelola e-Government yang disetujui dan ditetapkan	4 Dokumen	200,000,000	Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government	Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	50,000,000	

	Pengembangan SDM TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Kabupaten	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM TIK	150 orang	55,000,000						
	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kabupaten	Jumlah GCIO yang bersertifikat	5 orang	60,000,000						
	Pembinaan dan pengembangan Website Desa	Kabupaten	Jumlah website desa yang menggunakan domain desa.id	74 website	73,000,000	Pembinaan dan pengembangan Website Desa	Kabupaten	Jumlah website desa yang menggunakan domain desa.id	74 website	59,870,000	
	Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kabupaten	Jumlah dokumen evaluasi SPBE yang tersedia dan valid Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	6 Dokumen 3 kali	80,000,000						
12	<b>Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>					<b>Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>		SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			
	Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Kabupaten	Jumlah peserta bintek yang paham pengelolaan keamanan informasi dan persandian	40 peserta	30,000,000	Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Kabupaten	Jumlah peserta bintek yang paham	90 persen	17,774,400	
	Penyertaan diklat peningkatan kapasitas sandiman Kabupaten		Jumlah Sandiman yang bersertifikat	2 orang	40,000,000						
	JUMLAH					13.995.127.040				3.488.776.848	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melalui Musrenbang, maupun secara tertulis.

**Tabel. 2.4**

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2014-2019, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

*"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"*

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu:

- 1) *Terwujudnya Indonesia Informatif*, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) *Masyarakat sejahtera*, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai

keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.

- 3) *Pembangunan kominfo berkelanjutan*, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
- 4) *Pembangunan kominfo yang merakyat* adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
- 5) *Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan* adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
- 6) *NKRI*, yaitu Negara KeOrganisasi Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

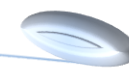
Sementara rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Tahun 2019 merupakan tahun kedua masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala dalam mencapai visi jangka menengah 2017 -2022 yaitu :

**“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara) ”**

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin



dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2019, yaitu :

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui diversifikasi dan penerapan teknologi pertanian
3. Meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, terjangkau dan memadai untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing

Secara khusus untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan perkotaan, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk memberikan kontribusi melalui penyiapan dan penyediaan infrastruktur Komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Disamping itu untuk mendukung Misi Keempat Kabupaten Barito Kuala, yaitu, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terakomodir pada rencana kerja (Program/Kegiatan) tahun 2019 ini.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika**

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Barito Kuala mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam

satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kominfo, maka Tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Tahun 2019

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah	Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaranluasan informasi public secara merata	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala

### 3.2.1 Sasaran dan Arah Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi diarahkan bagi peningkatan mutu pelayanan timbal balik dan arus informasi kepada dan dari masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kebijakan untuk mencapai sasaran adalah:

1. Fasilitasi penyediaan infrastruktur layanan telekomunikasi dan akses informasi publik.
2. Penambahan frekuensi penyebaran dan kualitas informasi publik.
3. Mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government).

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 12 program yang dirumuskan dalam rencana kerja Tahun 2019 yaitu :

#### **Bagian sekretariat**

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komuniaksi sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional
- d) Penyediaan alat tulis kantor
- e) Penyediaan barang cetak dan penggandaan



- f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- g) Penyediaan makanan dan minum
- h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a) Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c) Pengadaan peralatan gedung kantor
- d) Pengadaan mebeleur
- e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**

**Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**Bidang Kominfo**

**5. Program Pengelolaan Informasi Publik**

- a) Pembinaan dan Pengembangan Media Center Kabupaten
- b) Penyebarluasan informasi melalui media baru
- c) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Informasi

- d) Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan
- e) Pembinaan dan pengembangan penyebarluasan informasi melalui Media Pertunjukan Rakyat (Pentura)

**1. Program Pengelolaan Komunikasi Publik**

- 1. Sosialisasi Internet Sehat
- 2. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- 3. Pelayanan Pengaduan masyarakat

**2. Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universail Service Obligation (KPU/USO)**

- a) Fasilitas penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO
- b) Pembinaan dan pengembangan Fasilitas Akses informasi publik
- c) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- d) Pembinaan dan pengembangan internet Desa (Desa Broadband)

**3. Program Pengembangan Infrastruktur TIK**

- a) Pemeliharaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten
- b) Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten
- c) Penyediaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten
- d) Penyediaan Bandwidth Internet

**4. Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi**

- a) Penyediaan Layanan Portal Data "Batola One Data"
- b) Penyediaan aplikasi pelayanan publik
- c) Penyediaan Aplikasi pemerintahan

d) Penyediaan Aplikasi Smart City Command Center

**5. Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government**

- a) Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government
- b) Pengembangan SDM TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat
- c) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
- d) Penyusunan Detail Enggining Desain Smart City
- e) Pembinaan dan pengembangan Website Desa
- f) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
- g) Kerjasama pengembangan smart city/ smart regency
- h) Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan pemerintah pusat (baritokualakab.go.id)

**Bidang Statistik**

**6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

- a) Pengumpulan dan pengolahan data sektoral kabupaten

**Bidang Persandian**

**7. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

- a) Pengelolaan informasi pemerintah daerah yang berklasifikasi diamankan
- b) Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian
- c) Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)
- d) Fasilitasi pengelolaan keamanan sistem informasi SKPD
- e) Penyertaan diklat peningkatan kapasitas sandiman Kabupaten

Tabel 3.2

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0		<b>Non Urusan</b>									
0	0										
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		0%	154,588,250		0%	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KabupatenTenaga Administrasi Kantor Materai	SKPD	2 Orang 400 lembar	22,920,000	Pendapat an Daerah	0 Orang 0 lembar	0
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komuniaksi sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Langganan Yang di Bayarkan	SKPD	36 Bulan	25,080,000	Pendapat an Daerah Telpon, Air dan Listrik	0 Bulan	0
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional	PajakSTNK	SKPD	6 Unit	4,000,000	Pendapat an Daerah Pajak Tahunan STNK Mobil Dinas dan Kendaraan Dinas	0 Unit	0

0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	SKPD	31 jenis	14,637,500	Pendapatan Daerah	ATK	0 jenis	0
0	0	1	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak	SKPD	9 Jenis	7,200,750	Pendapatan Daerah	Ampolop Dinas, Map Dinas, Kwitansi, SPD, Kop Dinas, Disposisi, Jilid, Foto Copy	0 Jenis	0
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minum	Makanan dan Minuman yang disediakan	SKPD	5.360 Porsi	24,750,000	Pendapatan Daerah	Makan / Minum Rapat, Tamu dan Pegawai	0 Porsi	0
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Laporan Perjalanan Dinas	Kabupaten	15 Judul	48,500,000	Pendapatan Daerah		0 Judul	0
0	0	1	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Laporan Perjalanan Dinas	SKPD	30 Judul	7,500,000	Pendapatan Daerah	Koordinasi /Konsultasi Ke Desa / Kecamatan	0 Judul	0
0	0	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana.		0%				0%	
0	0	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan	SKPD	2 Unit	50,000,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
0	0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung	SKPD	1 Jenis	5,000,000	Pendapatan Daerah	Pengadaan gordena dan kelengkapannya	0 Jenis	0
0	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Disediakan	SKPD	4 Jenis	65,458,468	Pendapatan Daerah	Komputer, Laptop, Kamera dan Otomatis	0 Jenis	0

										Genset		
0	0	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubleur	SKPD	8 buah	12,000,000	Pendapat an Daerah	Meja dan Kursi	0 buah	0
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Yang di Rehab	SKPD	1 Unit	222,869,000	Pendapat an Daerah	Rehab Gedung Kantor, Alat Kebersiha n, Petugas Kebersiha n dan Jaga Malam	0 Unit	0
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang dipelihara	SKPD	6 Unit	16,799,690	Pendapat an Daerah	Mobil dan Kendaraan Dinas	0 Unit	0
0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	SKPD	3 Jenis	5,000,000	Pendapat an Daerah		0 Jenis	0
0	0	5		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat.		0%				0%	
0	0	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek		10 Orang	76,600,000	Pendapat an Daerah		0 Orang	0
0	0	6		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Jumlah Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan keuangan		0%				0%	

0	0	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang di Susun	SKPD	7 laporan	5,000,000	Pendapat an Daerah		0 laporan	0
4												
4	2	0		<b>Statistik</b>								
4	2	1	05	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	Data sektoral kabupaten yang akurat		0%				0%	
4	2	1	05	Pengumpulan dan pengolahan data sektoral kabupaten	Data sektoral kabupaten	Kabupaten	1 judul	42,190,000	Pendapat an Daerah		0 judul	0
4	1	6		<b>Komunikasi dan Informatika</b>								
4	1	1	69	<b>Program Pengelolaan Informasi Publik</b>	Peningkatan ketersediaan dan akses informasi publik		0 Pesentase (%)				0 Pesentase (%)	
4	1	1	69	Penyebarluasan informasi melalui media baru	Jumlah Informasi yang diproduksi dan dipublikasikan	Kabupaten	264 Informasi	203,800,000	Pendapat an Daerah		0 Informasi	0
4	1	1	69	Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan	Jumlah jenis media informasi yang digunakan	Kabupaten , SKPD	6 Jenis	34,940,000	Pendapat an Daerah		0 Jenis	0
4	1	2	60	<b>Program Pengelolaan Komunikasi Publik</b>	peningkatan Layanan Komunikasi Publik		0 Persentasi (%)				0 Persentasi (%)	
4	1	2	60	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah peserta sosialisasi internet sehat		450 peserta	25,430,000	Pendapat an Daerah		0 peserta	0

4	1	2		Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk		5 Kelompok	54,700,000	Pendapat an Daerah		0 Kelompok	0
4	1	2		<b>Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universail Service Obligation (KPU/USO)</b>	Menurunnya jumlah desa blankspot		0 Jumlah				0 Jumlah	
4	1	2		Fasilitasi penyediaan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO	Jumlah menara telekomunikasi KPU/USO yang diusulkan	Kabupaten	4 buah	36,600,000	Pendapat an Daerah		0 buah	0
4	1	2		Pembinaan dan pengembangan internet Desa (Desa Broadband)	Jumlah desa yang terkoneksi dengan jaringan internet	Kabupaten	50 Desa	29,650,000	Pendapat an Daerah		0 Desa	0
4	1	2		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah Menara Telekomunikasi/BTS yang sesuai cellplan	Kabupaten	102 buah	12,600,000	Pendapat an Daerah		0 buah	0
4	1	2		<b>Program Pengembangan Infrastruktur TIK</b>	peningkatan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informatika		0 Persen				0 Persen	
4	1	2		Penyediaan Bandwidth Internet	Jumlah kapasitas bandwidth	Kabupaten	400 Mbps	629,207,040	Pendapat an Daerah		0 Mbps	0



4	1	2		Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan E-Government Kabupaten	Jumlah titik interkoneksi Jaringan e-Gov yang terpelihara	Kabupaten	17 titik	391,150,000	Pendapatan Daerah		0 titik	0
4	1	2		Penyediaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	Jumlah titik interkoneksi jaringan e-Gov yang berfungsi dengan baik	Kabupaten , SKPD	28 titik	482,800,000	Pendapatan Daerah		0 titik	0
4	1	2		Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten	Peralatan Server Yang Tersedia	SKPD	1 Unit	354,142,960	Pendapatan Daerah	Peralatan Help Desk Center dan Server	0 Unit	0
4	1	2	3	<b>Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi</b>	ketersediaan aplikasi, sistem informasi dan data elektronik terintegrasi		0%				0%	
4	1	2	3	Penyediaan Aplikasi pemerintahan	Jumlah Aplikasi pemerintahan yang tersedia	Kabupaten	4 Aplikasi	450,607,040	Pendapatan Daerah		0 Aplikasi	0
4	1	2	4	<b>Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government</b>	Jumlah SKPD yang melaksanakan e-Government		0%				0%	
4	1	2	4	Pembinaan dan pengembangan Website Desa	Jumlah website desa yang menggunakan domain desa.id		74 website	59,870,000	Pendapatan Daerah		0 website	0
4	1	2	4	Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government	Jumlah dokumen perencanaan		1 Dokumen	50,000,000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0

4	2		<b>Persandian</b>								
4	2	1	<b>Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		0 Persentase (%)				0 Persentase (%)	
4	2	1	Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah peserta bintek yang paham	Kabupaten	90 persen	17,774,400	Pendapatan Daerah		0 persen	0
							<b>3.488.776.848</b>				<b>0</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhaprogram pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
<b>Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>154,588,250</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,920,000
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	25,080,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional	4,000,000
Penyediaan alat tulis kantor	14,637,500
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	7,200,750
Penyediaan makanan dan minum	24,750,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48,500,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7,500,000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>377,127,158</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	50,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor	65,458,468
Pengadaan mebeleur	12,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	222,869,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16,799,690
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>76,600,000</b>
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	76,600,000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5,000,000</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1,500,000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1,500,000
<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>42,190,000</b>
Pengumpulan dan pengolahan data sektoral kabupaten	42,190,000
<b>Program Pengelolaan Informasi Publik</b>	<b>238,740,000</b>
Penyebarluasan informasi melalui media baru	203,800,000
Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan	34,940,000
Peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi	12,808,000
<b>Program Pengelolaan Komunikasi Publik</b>	<b>80,130,000</b>
Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	54,700,000
Sosialisasi Internet Sehat	25,430,000
<b>Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universail Service Obligation (KPU/USO)</b>	<b>78,850,000</b>
Penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO	36,600,000
Pembinaan dan pengembangan internet Desa (Desa Broadband)	29,650,000
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	12,600,000
<b>Program Pengembangan Infrastruktur TIK</b>	<b>1,857,300,000</b>
Penyediaan Bandwidth Internet	629,207,040
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan E-Government Kabupaten	391,150,000
Penyediaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten	482,800,000
Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten	354,142,960

<b><i>Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi</i></b>	<b>450,607,040</b>
Penyediaan Aplikasi pemerintahan	450,607,040
<b><i>Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government</i></b>	<b>109,870,000</b>
Pembinaan dan pengembangan Website Desa	59,870,000
Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government	50,000,000
<b><i>Program Persandian untuk Pengamanan Informasi</i></b>	<b>17,774,400</b>
Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	17,774,400
<b>Total</b>	<b>3.488.776.848</b>

## **BAB V**

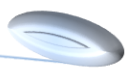
### **PENUTUP**

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan PD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan PD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selama Tahun Anggaran 2017, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kabupaten bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban umum, baik administrasi maupun non administrasi
- 3) Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 4) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia Di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain:
  - a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien
  - b) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat

- 
- c) Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan
  - d) Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik
  - e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Marabahan, Juli 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP  
NIP. 19650501 198602 1 007

